

BAB I PENDAHULUAN

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal urusan pemerintahan bidang keuangan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasan pengelolaan keuangan selama TA 2020 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).

- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan - peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA. 2020;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2020;

15. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
16. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/185/024-IV/Keu tentang Pengelolaan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

- 5.1.1 Pendapatan
- 5.1.2. Belanja
- 5.1.3 Transfer
- 5.1.4 Pembiayaan
- 5.1.5. Pendapatan LO
- 5.1.6. Beban LO
- 5.1.7. Aset
- 5.1.8. Kewajiban
- 5.1.9. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Bab VI Penjelasan atas Informasi - Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. *Ekonomi Makro*

Kinerja ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan III 2020 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan perbaikan di level nasional, yang didorong oleh perbaikan hampir seluruh lapangan usaha kecuali konstruksi. Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponennya mengalami perbaikan ekonomi baik secara tahunan maupun triwulanan, kecuali investasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Timur pada triwulan III 2020 mengalami penurunan yang bersumber dari rendahnya realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Realisasi belanja APBN wilayah Kaltim sampai dengan triwulan III 2020 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Inflasi Kaltim tahun 2020 tercatat mencapai angka terendah dalam beberapa tahun terakhir dan terendah se Kalimantan. Rendahnya inflasi ini terutama disebabkan oleh deflasi kelompok transportasi akibat pembatasan mobilitas masyarakat selama masa pandemi Covid 19. Deflasi juga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki yang bukan menjadi kebutuhan primer. Stabilitas keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan III tahun 2020 masih tertekan terutama karena tertekannya sektor korporasi. Perkembangan penghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) Kaltim tercatat menguat, penyaluran kredit Kaltim secara umum tumbuh melambat dengan risiko kredit yang memburuk kecuali kredit kepada Rumah Tangga dan UMKM serta pembiayaan syariah yang membaik.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mendapatkan pengurangan anggaran sebesar Rp13.456.390.749,50 dari anggaran murni sebesar Rp77.026.798.960,00 atau sebesar -17,47%, dengan pertimbangan tersebut penambahan dan pengurangan anggaran dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Belanja Langsung Perubahan Tahun 2020

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Penambahan / Pengurangan	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22.703.313.480,00	688.860.832.50	23.392.174.312,50
07	01	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	22.703.313.480,00	688.860.832.50	23.392.174.312,50
08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.661.630.980,00	-9.242.790.582,00	21.418.840.398,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Penambahan / Pengurangan	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
08	01	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	24.623.733.000,00	-10.206.240.582,00	14.417.492.418,00
08	02	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	6.037.897.980,00	963.450.000,00	7.001.347.980,00
09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	5.066.494.000,00	1.497.146.000,00	6.563.640.000,00
09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	4.636.744.000,00	1.708.546.000,00	6.345.290.000,00
09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	429.750.000,00	-211.400.000,00	218.350.000,00
10		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	778.271.000,00	-26.250.000,00	752.021.000,00
10	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	152.021.000,00	-60.000.000,00	92.021.000,00
10	02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	626.250.000,00	33.750.000,00	660.000.000,00
31		Program Koordinasi Pajak Daerah	5.136.010.500,00	-1.311.340.500,00	3.824.670.000,00
31	01	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	700.665.250,00	-109.765.250,00	590.900.000,00
31	02	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	2.874.175.500,00	86.494.500,00	2.960.670.000,00
31	03	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	1.561.169.750,00	-1.288.069.750,00	273.100.000,00
32		Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	2.329.057.500,00	-1.458.832.500,00	870.225.000,00
32	01	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	984.670.000,00	-582.720.000,00	401.950.000,00
32	02	Koordinasi Penerimaan lain-lain	454.087.500,00	-301.412.500,00	152.675.000,00
32	03	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	890.300.000,00	-574.700.000,00	315.600.000,00
33		Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	1.392.407.000,00	-721.337.000,00	671.070.000,00
33	02	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	669.050.000,00	-377.500.000,00	291.550.000,00
33	03	Kajian Hukum dan Perundang-undangan	723.357.000,00	-343.837.000,00	379.520.000,00
34		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	3.158.010.000,00	-1.135.355.000,00	2.022.655.000,00
34	01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	927.390.000,00	-639.690.000,00	287.700.000,00
34	02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	2.230.620.000,00	-495.665.000,00	1.734.955.000,00
35		Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	5.801.607.500,00	-1.746.492.000,00	4.055.112.500,00
35	01	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	1.829.580.000,00	-440.480.000,00	1.389.100.000,00
35	02	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	3.972.024.500,00	-1.306.012.000,00	2.666.012.500,00
		Jumlah	77.026.798.960,00	-13.456.390.749,50	63.570.408.210,50

Anggaran Belanja Langsung Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp63.570.408.210,50 sebagaimana rincian diatas, mengalami peningkatan sebesar Rp6.816.866.210,50 atau sebesar 10,73% bila dibandingkan anggaran tahun lalu yaitu 56.753.542.000,00. Peningkatan anggaran tersebut dialokasikan pada semua program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan menyelaraskan dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visinya di tahun 2023.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumber daya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamanahkan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp3.923.004.269.597,53 nilai ini melampaui dari targetnya sebesar Rp687.504.269.597,53 atau sebesar 121,25%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan Rp1.120.971.941.013,97 atau sebesar -22,22% dari realisasi pendapatan tahun lalu sebesar Rp5.043.976.210.611,50. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp163.950.201.528,87 nilai ini lebih kecil dari anggaran sebesar Rp33.494.823.711,60 atau sebesar 83,04%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar Rp13.737.376.082,35 atau sebesar-7,73% dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp177.687.577.611,22. Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja Dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.392.174.312,50	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	87%
07	01	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	23.392.174.312,50	Lancarnya kinerja aparatur	12 bulan
08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21.418.840.398,00	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	5 unit
08	01	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	14.417.492.418,00	Terselenggaranya kegiatan kantor	8 jenis
08	02	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	7.001.347.980,00	Terpeliharanya jenis peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis
09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	6.563.640.000,00	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	63 %
09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	6.345.290.000,00	Tercapainya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	45 koordinasi / konsultasi
09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	218.350.000,00	Meningkatnya kemampuan dan wawasan SDM pegawai	15 PNS
10		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	752.021.000,00	Tercapainya Kinerja Instansi Pemerintah	68 nilai AKIP
10	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	92.021.000,00	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Anggaran	4 dokumen
10	02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	660.000.000,00	Tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan dan anggaran	5 dokumen / laporan
31		Program Koordinasi Pajak Daerah	3.824.670.000,00	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	100 %
31	01	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	590.900.000,00	Tercapainya target tunggakan pajak	60.000.000.000
31	02	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	2.960.670.000,00	Tercapainya target pendapatan PKB dan BBNKB	824.000.000.000
31	03	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	273.100.000,00	Tercapainya target pendapatan PBBKB, Pajak AP dan Pajak Rokok	2.996.000.000.000
32		Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	870.225.000,00	Tercapainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100 %
32	01	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	401.950.000,00	Tercapainya target retribusi daerah	33.620.185.000
32	02	Koordinasi Penerimaan lain-lain	152.675.000,00	Tercapainya target penerimaan lain-lain	227.112.000.000
32	03	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	315.600.000,00	Tercapainya target penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak	3.007.720.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
33		Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	671.070.000,00	Tersedianya hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	18 dokumen
33	02	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	291.550.000,00	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendapatan	3 jenis pendapatan
33	03	Kajian Hukum dan Perundang-undangan	379.520.000,00	Tercapainya regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah	5 dokumen peraturan
34		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	2.022.655.000,00	Tercapainya tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain	100%
34	01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	287.700.000,00	Terlaksananya pembukuan dan penagihan objek pajak dan bukan pajak	5.000.000.000
34	02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	1.734.955.000,00	Terlaksananya pendataan dan penetapan objek pajak daerah, retribusi daerah dan PLL	420.000.000.000
35		Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	4.055.112.500,00	Tercapainya perencanaan dan pengembangan sumber pendapatan daerah	4 obyek/sumber pendapatan baru
35	01	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	1.389.100.000,00	Terealisasinya sumber pendapatan baru	4 sumber pendapatan baru
35	02	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	2.666.012.500,00	Terwujudnya kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan	2 kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan

Dalam pencapaian target-target tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan.

Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2020 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (07)**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp23.392.174.312,50 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp20.916.590.354,00 atau 89,42%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp16.071.975.933,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.844.614.421,00 atau 30,14%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (07.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp23.392.174.312,50 dan terealisasi sebesar Rp20.916.590.354,00 atau 89,42%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu Rp16.071.975.933,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.844.614.421,00 atau 30,14%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (08)**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp21.418.840.398,00 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp19.239.174.897,25 atau 89,82%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp10.610.016.883,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp8.629.158.014,25 atau 81,33%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (08.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp14.417.492.418,00 dan terealisasi sebesar Rp12.653.759.582,65 atau 87,77%. Bila dibandingkan dengan

realisasi tahun lalu sebesar Rp4.642.367.577,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp8.011.392.005,65 atau 172,57% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (08.02)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp7.001.347.980,00 dan terealisasi sebesar Rp6.585.415.314,60 atau 94,06%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp5.967.649.306,80 maka terjadi kenaikan sebesar Rp617.766.007,80 atau 10,35% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (09)**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp6.563.640.000,00 pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp5.473.678.568,00 atau 83,39%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp6.231.243.236,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp757.564.668,00 atau -12,16%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah (09.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp6.345.290.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.392.888.064,00 atau 84,99%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp5.473.932.647,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp81.044.583,00 atau -1,48% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (09.02)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp218.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp80.790.504,00 atau 37,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp757.310.589,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp676.520.085,00 atau -89,33% dari tahun lalu. Pencapaian realisasi target di bawah 80 persen disebabkan pandemi covid 19 selama tahun 2020.

- **Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (10)**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp752.021.000,00 pada Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp574.881.300,00 atau 76,44%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp741.752.147,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp166.870.847,00 atau -22,50%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- *Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran (10.01)*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp92.021.000,00 dan terealisasi sebesar Rp86.811.000,00 atau 94,34%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp288.990.787,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp202.179.787,00 atau -69,96% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- *Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (10.02)*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp660.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp488.070.300,00 atau 73,95%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp452.761.360,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp35.308.940,00 atau 7,80% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Program Koordinasi Pajak Daerah (31)**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp3.824.670.000,00 pada Program Koordinasi Pajak Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp3.469.254.107,00 atau 90,71%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp4.580.898.573,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.111.644.466,00 atau -24,27%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Pendataan, Administrasi dan Keberatan Pajak (31.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp590.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp460.770.818,00 atau 77,98%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp449.239.145,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp11.531.673,00 atau 2,57% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Peningkatan Pendapatan PKB dan BBNKB (31.02)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.960.670.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.838.726.389,00 atau 95,88%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp2.914.994.250,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp76.267.861,00 atau -2,62% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Peningkatan Pendapatan PKB dan BBNKB (31.03)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp273.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp169.756.900,00 atau 62,16%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp1.216.665.178,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.046.908.278,00 atau -86,05% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak (32)**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp870.225.000,00 pada Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp747.610.724,00 atau 85,91%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp1.934.811.484,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.187.200.760,00 atau -61,36%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah (32.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp401.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp332.705.400,00 atau 82,77%. Bila dibandingkan dengan

realisasi tahun lalu sebesar Rp830.564.845,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp497.859.445,00 atau -59,94% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Penerimaan Lain-Lain (32.02)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp152.675.000,00 dan terealisasi sebesar Rp133.764.024,00 atau 87,61%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp366.174.467,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp232.410.443,00 atau -63,47% dari tahun lalu.

- ***Kegiatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (32.03)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp315.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp281.141.300,00 atau 89,08%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp738.072.172,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp456.930.872,00 atau -61,91% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan (33)**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp671.070.000,00 pada Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp546.305.600,00 atau 81,41%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp840.323.131,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp294.017.531,00 atau -34,99%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pendapatan Daerah (33.02)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp291.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp200.901.900,00 atau 68,91%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp356.310.300,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp115.408.400,00 atau -43,62% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- *Kegiatan Kajian Hukum dan Perundang-undangan (33.03)*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp379.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp345.403.700,00 atau 91,01%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp484.012.831,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp138.609.131,00 atau -28,64% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain (34)**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.022.655.000,00 pada Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.821.248.043,00 atau 90,04%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp4.283.670.814,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.462.422.771,00 atau -57,48%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- *Kegiatan Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak (34.01)*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp287.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp270.329.138,00 atau 93,96%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp2.697.608.961,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.427.279.823,00 atau -89,98% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- *Kegiatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL (34.02)*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.734.955.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.550.918.905,00 atau 89,39%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp1.586.061.853,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp35.142.948,00 atau -2,22% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah (35)**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp4.055.112.500,00 pada Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.549.600.699,00 atau 62,87%. Program kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 sehingga tidak ada perbandingan realisasi dengan tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan (35.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.389.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp707.863.356,00 atau 50,96%. Program kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 sehingga tidak ada perbandingan realisasi dengan tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah (35.02)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.666.012.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.841.737.343,00 atau 69,08%. Program kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 sehingga tidak ada perbandingan realisasi dengan tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pencapaian target yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2020 tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti, hal ini disebabkan penurunan angka target dan pengurangan beberapa mata anggaran terkait pandemi Covid 19.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2. Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur No. 86 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1. Penggunaan Aplikasi Berbasis Sistem Informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.

- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2. Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1. Pendapatan – LRA

- **Definisi**

Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- **Pengakuan**

Pendapatan–LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- **Pengukuran**

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima

4.4.2.2. Belanja

- **Definisi**

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- **Pengukuran**

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4.4.2.3. Pendapatan – LO

- **Definisi**

Pendapatan–LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

Pendapatan–LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan–LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan–LO yang diterima berupa barang/ jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4. Beban

- **Definisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu :

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Keuangan
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

4.4.2.5. Aset

- **Definisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu:

- **Aset lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka.

- **Aset nonlancar**

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset nonlancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- **Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepengusaannya berpindah.

- **Pengukuran**

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut :

- Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/ sosial di tahun mendatang.
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya.
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
 - ✓ Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas
 - ✓ Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di BLUD

Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara BOS

Kas Lainnya

Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Uang Muka

Panjar Kegiatan

Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Goodwill

Lisensi dan frenchise

Hak Cipta

Paten

Aset Tidak Berwujud Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

4.4.2.6. Kewajiban

- **Definisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

- **KEWAJIBAN**
 - **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Utang Bunga
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - Pendapatan Diterima Dimuka
 - Utang Beban
 - Utang Jangka Pendek Lainnya
 - **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
 - Utang Dalam Negeri
 - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7. Ekuitas

- **Definisi**
Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
- **Pengakuan**
Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan–LO dan Beban karena pada saat pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya koreksi pencatatan.
- **Pengukuran**
Ekuitas dicatat sebesar nilai aset setelah dikurangi kewajiban.
- **Penyajian**
Ekuitas disajikan di Neraca dibawah penyajian kewajiban.

BAB V

RINCIAN DAN PENJELASAN POS - POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2020.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp3.235.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.922.962.247.993,90 atau sebesar 121,25%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 telah menargetkan rincian obyek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok, Pendapatan Retribusi Daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan, Lain-lain PAD Yang Sah berupa Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan Denda Retribusi, dan Pendapatan dari Pengembalianserta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		(% 4=(3/2)	31 Desember 2019	% Naik (Turun) 6=((3-5)/5)×100
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3		5	
PENDAPATAN - LRA	3.235.500.000.000,00	3.923.004.269.597,53	121,25	5.043.976.210.611,50	-22,22
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	3.235.500.000.000,00	3.914.261.434.597,53	120,98	5.032.267.120.611,50	-22,22
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	3.235.500.000.000,00	3.900.430.668.628,53	120,55	4.984.520.517.158,5	-21,75
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	360.703.000,00	0,00	157.922.324,00	143,88
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	13.470.062.969,00	0,00	47.588.681.129,00	-71,75
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	0,00	8.742.835.000,00	0,00	11.709.090.000,00	-25,33
Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	8.742.835.000,00	0,00	11.709.090.000,00	-25,33

Realisasi pendapatan melampaui target yang telah ditetapkan, namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu mengalami penurunan sebesar 22,22%. Adapun penjelasan dari masing-masing rincian obyek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penarikan pajak sebagai salah satu pendapatan daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 adalah sebesar Rp3.900.430.668.628,53 atau sebesar 120,55% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.084.089.848.529,97 atau sebesar -21,75% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.984.520.517.158,50. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Anggaran Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)x100	5	6=((3-5)/5)x100
Pajak Kendaraan Bermotor	830.000.000.000,00	949.902.805.221,00	114,45	1.007.247.015.109,00	-5,69
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	650.000.000.000,00	722.349.663.199,00	111,13	993.609.883.249,00	-27,30
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.750.000.000.000,00	1.984.525.167.946,63	113,40	2.799.415.975.548,00	-29,11
Pajak Air Permukaan	5.500.000.000,00	8.674.991.058,90	156,96	10.784.004.364,50	-19,95
Pajak Rokok	157.290.000.000,00	234.978.041.203,00	149,39	173.463.638.888,00	35,46
Jumlah	3.235.500.000.000,00	3.900.388.647.024,90	120,55	3.900.388.647.024,90	5,67

5.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dari target sebesar Rp830.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp949.902.805.221,00 atau 117,12%. Hal ini disebabkan oleh :

- Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai dampak dari kemudahan layanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti mempermudah pembayaran pajak oleh wajib pajak secara Elektronik (E-Samsat) melalui ATM Bank Pembangunan Daerah Kaltimara, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) , PT. Bank Mandiri (Persero), PT. Bank Central Asia Tbk, Smartphone, MPosPay, Loker Pos, Delivery Pos, Loker PT. Pegadaian dan seluruh Gerai Indomaret.
- Adanya relaksasi pajak terkait pandemi Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi administrasi Pajak Kendaraan bermotor, diterbitkan tanggal 24 Maret 2020 yang isinya antara lain adanya Pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan terhadap semua kendaraan bermotor yang masa pajaknya terhitung sejak tanggal 24 Maret sampai dengan 30 Juni 2020. Wajib pajak hanya dikenakan pokok PKB selama masa pembebasan sanksi administrasi PKB.

- Selain itu juga diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor diterbitkan tanggal 28 Mei 2020, yang isinya antara lain Keringanan PKB hanya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut
 - Masa pajak jatuh tempo 1 (satu) tahun sebesar 10 %
 - Masa pajak jatuh tempo 2 (dua) tahun sebesar 15 %
 - Masa pajak jatuh tempo 3 (tiga) tahun sebesar 20 %
 - Masa pajak jatuh tempo 4 (empat) tahun sebesar 25 %
 - Masa pajak jatuh tempo 5 (lima) tahun sebesar 30 %
 - Pembebasan sanksi administrasi PKB berupa denda dan bunga
- Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan Sistem online yang terintegrasi di seluruh wilayah Kalimantan Timur, dimana pembayaran bisa dilakukan pada seluruh wilayah Kalimantan Timur
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan penagihan dan inventarisasi (pendataan) terhadap objek pajak kendaraan bermotor umum dan kendaraan alat berat/besar baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- Meningkatkan pelayanan publik kepada wajib pajak dengan membangun sarana dan prasarana yang baru dan baik seperti Samsat Penuh di wilayah Rapak Balikpapan, Samboja dan Samarinda Seberang, Samsat Payment Point, Peningkatan Status Samsat Pembantu, Samsat Mobile/Jelajah/Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Delivery Order, Samsat Online dan Samsat Terapung.
- Penagihan secara terus menerus kepada pemilik Alat Berat/Alat Besar pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/PUU-XV/2017
- Mengadakan rapat koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait dengan penagihan Pajak Alat Berat bagi perusahaan yang tidak mau membayar dengan dalih putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017.
- Pembukaan berbagai Pelayanan Samsat Payment Point yang tersebar di Wilayah Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kaltimara.
- Adanya pengembangan Sistem Informasi/Inovasi atas Pajak Kendaraan Bermotor kepada masyarakat (publik) sehingga lebih memudahkan masyarakat (wajib pajak) mengetahui jumlah pajak terutang dan melakukan pembayaran melalui Aplikasi Uang Elektronik. Saat ini pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bisa melalui aplikasi Link Aja, Tokopedia, Paykaltimara.

Bila Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.007.247.015.109,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp57.344.209.088,00 atau sebesar -5,69%, hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid 19 yang menurunkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga mengurangi kemampuan untuk membayar pajak walaupun telah diberikan relaksasi berupa pembebasan denda pajak.

5.1.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari target sebesar Rp650.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp722.349.663.199,00 atau 111,13%. Hal ini disebabkan oleh :

- Adanya relaksasi pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan bermotor terkait Pandemi Covid-19 dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Keringanan Pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tahun 2020 diterbitkan tanggal 3 Juli 2020, yang isinya antara lain keringanan pokok BBNKB kedua dan seterusnya diberikan sebesar 40% (empat puluh persen).
- Pembebasan sanksi administrasi BBNKB kedua dan seterusnya berupa bunga dan denda.
- Keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya Tahun 2020 diberikan terhitung sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020.
- Perpanjangan masa berlaku keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Bila Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp993.609.883.249,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp271.260.220.050,00 atau sebesar -27,30%, hal ini disebabkan penyesuaian penurunan target pendapatan di seluruh sektor penerimaan karena adanya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan sosial ekonomi

membuat aktivitas ekonomi dunia usaha berjalan lambat bahkan sebagian besar terhenti.

5.1.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari target sebesar Rp1.750.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.984.525.167.946,63 atau 113,40%. Hal ini disebabkan oleh :

- Adanya kenaikan harga minyak dunia, pada bulan April 2020 berkisar pada harga US\$21 per barel, sedangkan harga minyak posisi pada tanggal 8 Desember 2020 sebesar US\$45,44 per barel
- Terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang berdampak pada peningkatan penggunaan bahan bakar sebagai objek PBBKB.
- Asumsi konsumen pemakaian volume pertalite meningkat karena pemakaian volume BBM dari jenis premium terbatas.
- Asumsi peningkatan pemakaian volume BBM dari jenis bio solar, solar subsidi, pertamax, pertalite, pertamina dex, dextrite dan solar industri.
- Dilakukan evaluasi dan pengendalian penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk penggunaan genset terkait pengenaan tarif PBBKB 0%.
- Adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PBBKB yang dilakukan ke SPBU dan Wajib Pungut (WAPU)

Bila Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.799.415.975.548,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp814.890.807.602,00 atau sebesar -29,11%, hal ini disebabkan penyesuaian penurunan target pendapatan di seluruh sektor penerimaan karena adanya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan sosial ekonomi membuat aktivitas ekonomi dunia usaha berjalan lambat bahkan sebagian besar terhenti.

5.1.1.1.4. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pendapatan Pajak Air Permukaan dengan target sebesar Rp5.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp8.674.991.058,90 atau 156,96%. Tercapainya target disebabkan oleh :

- Koordinasi yang baik antara Tim Intensifikasi dengan Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan operasional di lapangan.
- Adanya penambahan pemakaian air permukaan dari sektor industri pertambangan , perkebunan kelapa sawit, perhotelan, PDAM dan lainnya.
- Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan dari perusahaan baru oleh Dinas PUPR sehingga pemakaian air permukaan bertambah.

Bila Pendapatan Pajak Air Permukaan realisasi penerimaan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp10.784.004.364,50 terjadi penurunan sebesar Rp2.109.013.305,60 atau sebesar -19,95%, hal ini disebabkan oleh penyesuaian penurunan target pendapatan di seluruh sektor penerimaan karena adanya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan sosial ekonomi membuat aktivitas ekonomi dunia usaha berjalan lambat bahkan sebagian besar terhenti.

5.1.1.1.5. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pendapatan Pajak Rokok tahun anggaran 2020 dengan target sebesar Rp157.290.000.000,00 terealisasi sebesar Rp234.978.041.203,00 atau sebesar 149,39%.

Bila Pendapatan Pajak Rokok tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp173.463.638.888,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp61.514.402.315,00 atau sebesar 35,46%, hal ini disebabkan adanya kenaikan konsumsi rokok di provinsi Kalimantan Timur, kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen dan kenaikan harga jual eceran sebesar 35 persen pada tahun 2020.

5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari 12 obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada masyarakat atas layanan berupa :

- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
- Retribusi Sewa Rumah Dinas
- Retribusi Sewa Asrama/Mess/Kelas
- Retribusi Sewa Gedung/Aula/Ruang Serba Guna
- Retribusi Sewa Lahan/Petak
- Retribusi Pengujian Lab

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp360.703.000,00, dibandingkan dari tahun 2019 sebesar Rp157.922.324,00, mengalami kenaikan sebesar Rp202.780.676,00 atau 128,41%.

5.1.1.3. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah. Penjelasan rinci atas Lain-Lain PAD yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.3.1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan aset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp24.440.000,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp300.891.490,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp276.491.490,00 atau sebesar -91,89%.

5.1.1.3.2. Pendapatan Denda Pajak – LRA

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menarik Denda Pajak kepada wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak. Pendapatan Denda Pajak terealisasi sebesar Rp13.442.272.627,00. Bila Pendapatan Denda Pajak-LRA tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp46.914.221.053,00

maka terjadi penurunan sebesar Rp33.471.948.426,00 atau sebesar 71,35%. Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut :

Tabel 5. Pendapatan Denda Pajak - LRA

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	2	3	4
1.	Pendapatan Denda PKB Umum	11.196.193.920,00	43.025.635.167,00
2.	Pendapatan Denda BBNKB Umum	910.168.890,00	2.163.377.050,00
3.	Pendapatan Denda PBBKB	920.945.696,00	243.698.430,00
4.	Pendapatan Denda PAP	158.657.556,00	823.520.290,00
5.	Pendapatan Denda PKB Alat Berat	38.760.470,00	648.851.114,00
6.	Pendapatan Denda BBN Alat Berat	217.546.095,00	9.139.002,00
Jumlah		13.442.272.627,00	46.914.221.053,00

5.1.1.3.3. Pendapatan Denda Retribusi – LRA

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menarik Denda Retribusi kepada wajib retribusi atas keterlambatan pembayaran retribusi. Pendapatan Denda Retribusi terealisasi sebesar Rp1.838.000,00. Bila Pendapatan Denda Retribusi-LRA tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp83.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.755.000,00 atau sebesar 2.114,46%.

5.1.1.3.4. Pendapatan dari Pengembalian - LRA

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh Pendapatan dari Pengembalian Lainnya sebesar Rp1.512.342,00. Bila Pendapatan dari Pengembalian Lainnya tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp6.949.381,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.437.039,00 atau -78,24%.

5.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga pada tahun 2020 sebesar Rp8.742.835.000,00 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp11.709.090.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.966.255.000,00 atau -25,34%.

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp197.445.025.240,47,00 terealisasi sebesar Rp163.950.201.528,87 atau sebesar 83,04%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasional dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=((3-5)/5*100)
Belanja	197.445.025.240,47	163.950.201.528,87	83,04	177.687.577.611,22	-7,73
<i>Belanja Operasi</i>	184.549.095.822,47	152.808.554.311,22	82,80	173.008.719.197,22	-11,68
Belanja Pegawai	133.874.617.029,97	108.611.857.236,62	81,13	127.186.342.302,42	-14,60
Belanja Barang dan Jasa	50.674.478.792,50	44.196.697.074,60	87,22	45.822.376.894,80	-3,55
<i>Belanja Modal</i>	12.895.929.418,00	11.141.647.217,65	86,40	4.678.858.414,00	138,13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.290.279.418,00	5.794.804.270,00	92,12	3.195.018.154,00	81,37
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.605.650.000,00	5.346.842.947,65	80,94	1.483.840.260,00	260,34

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 93,47%. Dari target sebesar Rp184.549.095.822,47 terealisasi sebesar Rp152.808.554.311,22 atau 82,80%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik / Turun	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4 = (3/2)*100	5	6 = ((3-5)/5)*100
Belanja Operasi	184.549.095.822,47	152.808.554.311,22	82,80	173.008.719.197,22	-11,68
Belanja Pegawai	133.874.617.029,97	108.611.857.236,62	81,13	127.186.342.302,42	-14,60
Belanja Barang dan Jasa	50.674.478.792,50	44.196.697.074,60	87,22	45.822.376.894,80	-3,55

- Belanja Pegawai

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp133.874.617.029,97 untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp108.611.857.236,62 atau sebesar 81,13%.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = ((3-5)/5)
Belanja Pegawai	133.874.617.029,97	108.611.857.236,62	81,13	127.186.342.302,42	-14,60
Belanja Gaji dan Tunjangan	14.902.352.000,00	14.200.010.848,00	95,29	14.605.056.703,00	-2,77
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	21.907.265.000,00	10.265.730.000,00	46,86	15.157.180.000,00	-32,27
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	97.065.000.029,97	84.146.116.388,62	86,69	97.424.105.599,42	-13,63

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar Rp25.262.759.793,35 atau sebesar 18,87% disebabkan adanya beberapa pegawai yang purna tugas, meninggal dunia dan diberhentikan secara hormat.

- **Belanja Barang dan Jasa**

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengganggu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp50.674.478.792,50 dengan realisasi sebesar Rp44.196.697.074,60 atau sebesar 87,22%.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=((3-5)/5)*100
Belanja Barang dan Jasa	50.674.478.792,50	44.196.697.074,60	87,22	45.822.376.894,80	-3.55
Belanja Bahan Pakai Habis	2.452.284.120,00	2.180.247.672,00	88,91	1.484.470.087,00	46,87
Belanja Jasa Kantor	21.315.922.272,50	19.118.717.396,00	89,69	13.980.785.762,00	36,75
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.193.465.020,00	978.707.659,00	82,01	997.723.449,00	-1,91
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.279.259.000,00	1.178.834.531,00	92,15	1.080.888.632,00	9,06
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	393.200.000,00	349.250.000,00	88,82	700.465.210,00	-50,14
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	412.950.000,00	324.978.000,00	78,70	75.000.000,00	333,30
Belanja Makanan dan Minuman	1.191.732.500,00	720.247.400,00	60,44	1.385.067.837,00	-48,00
Belanja Perjalanan Dinas	7.768.000.000,00	6.297.373.470,00	81,07	10.938.305.678,00	55,17
Belanja Pemeliharaan	5.026.412.880,00	4.757.824.014,60	94,66	4.779.220.039,80	-0,45
Belanja Jasa Konsultasi	556.160.000,00	461.052.600,00	82,90	0,00	100,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	60.000.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	-100,00
Belanja Honorarium PNS	5.721.180.000,00	5.044.040.307,00	88,16	6.044.415.000,00	-16,55
Belanja Honorarium Non PNS	750.630.000,00	531.695.000,00	70,83	1.076.619.000,00	-50,61
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.870.300.000,00	1.862.966.759,00	99,16	1.223.750.000,00	52,23

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			Realisasi
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=((3-5)/5)*100
Belanja Iuran Sekretariat Bersama	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	72.000.000,00	0,00
Belanja Pengadaan Meubelair	21.125.000,00	21.124.994,00	99,99	0,00	100,00
Belanja Pengadaan Peralatan Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	0,00	100,00
Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor	136.728.000,00	134.912.500,00	98,67	30.520.000,00	342,05
Belanja Pengadaan Peralatan Komputer	44.000.000,00	42.385.000,00	96,33	9.643.600,00	339,51
Belanja Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	45.430.000,00	26.639.772,00	58,64	1.980.000,00	1.245,44
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	356.000.000,00	86.000.000,00	24,16	1.275.600.000,00	-93,26

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp6.477.781.717,90 atau sebesar 12,78% dan realisasi belanja yang kurang dari 60 persen yaitu pada anggaran Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Belanja Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, dan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, hal ini disebabkan adanya pandemi Covid 19 sejak awal Maret 2020 yang membatasi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi.

5.1.2.2. Belanja Modal

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp4.951.845.750,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp 4.678.858.414,00 atau sebesar 94,49%.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			Realisasi
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	12.895.929.418,00	11.141.647.217,65	86,40	4.678.858.414,00	249,98
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.290.279.418,00	3.195.018.154,00	92,12	3.195.018.154,00	140,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.605.650.000,00	5.346.842.947,65	80,94	1.483.840.260,00	100,00

Realisasi Belanja modal sebesar Rp11.141.647.217,65 dipergunakan untuk menambah aset berupa :

- Peralatan dan mesin seperti kendaraan dinas untuk Eselon II dan Eselon III, meubelair, rak arsip, televisi, cctv, meja resepsionis, media center, air conditioner, personal komputer dan lain-lain.
- Bangunan dan gedung seperti pembangunan gudang arsip kantor UPTD PPRD Wilayah Berau, ruang cek fisik, ruang cetak TNKB Samsat Samboja, gedung Samsat Teluk Dalam, rehab rumah dinas UPTD PPRD Wilayah Bontang, ruang TNKB Samsat MT. Haryono dan lain-lain.

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp1.754.282.200,35 atau sebesar 13,60% disebabkan oleh efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja.

5.1.3. Pendapatan – LO

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar Rp5.046.010.689.795,49, nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2019 sebesar Rp4.724.655.355.567,03 maka terdapat kenaikan sebesar Rp321.355.334.228,46 atau sebesar 6,80%. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 11. Realisasi Pendapatan LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 31 Des 2020	Realisasi 31 Des 2019	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
PENDAPATAN - LO	3.824.520.626.921,04	5.046.010.689.795,49	-24,21
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO</u>	3.816.313.621.921,04	5.034.301.599.795,49	-24,19
Pendapatan Pajak Daerah – LO	3.803.187.651.351,53	4.984.541.507.704,50	-23,70
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	232.969.667,01	123.755.656,99	88,25
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	12.893.000.902,50	49.636.336.434,00	-74,03
<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</u>	8.207.005.000,00	11.709.090.000,00	-29,91
Pendapatan Lainnya - LO	8.207.005.000,00	11.709.090.000,00	-29,91

5.1.3.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 memperoleh Pendapatan Pajak Daerah–LO sebesar Rp3.803.187.651.351,53. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp4.984.541.507.704,50 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp1.181.353.856.352,97 atau -23,70%. Rincian pendapatan pajak daerah–LO tahun 2020 komparasian dengan tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	% Naik (Turun)
1	2	3	4= ((2-3)/3)
Pajak Kendaraan Bermotor - LO	899.624.141.859,00	1.002.622.506.562,00	-10,27
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	671.092.384.910,00	996.291.656.617,00	-32,64
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	1.989.781.199.037,63	2.801.264.548.520,00	-28,97
Pajak Air Permukaan - LO	7.711.884.341,90	10.899.157.117,50	-29,24
Pajak Rokok - LO	234.978.041.203,00	173.463.638.888,00	-35,46
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO	3.803.187.651.351,53	4.984.541.507.704,50	-23,70

5.1.3.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor – LO

Bila Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor - LO tahun 2020 sebesar Rp899.624.141.859,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.002.622.506.562,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp102.998.364.703,00 atau sebesar -10,27%.

5.1.3.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO

Bila Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO tahun 2020 sebesar Rp671.092.384.910,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp996.291.656.617,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp325.199.271.707,00 atau sebesar -32,64%.

5.1.3.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO

Bila Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO tahun 2020 sebesar Rp1.989.781.199.037,63 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar

Rp2.801.264.548.520,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp811.483.349.482,37 atau sebesar -28,97%.

5.1.3.1.4. Pajak Air Permukaan – LO

Bila Pendapatan Pajak Air Permukaan - LO tahun 2020 sebesar Rp7.711.884.341,90 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp10.899.157.117,50 maka terjadi penurunan sebesar Rp3.187.272.775,60 atau sebesar -29,24%.

5.1.3.1.5. Pajak Rokok – LO

Bila Pendapatan Pajak Rokok - LO tahun 2020 sebesar Rp234.978.041.203,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp173.463.638.888,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp61.514.402.315 atau sebesar 35,46%.

5.1.3.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah-LO dari Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp232.969.667,01. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp123.755.656,99 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp109.214.010,02 atau 88,25%.

5.1.3.3. Lain – Lain PAD Yang Sah – LO

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah-LO. Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pada tahun 2020 realisasi Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp12.893.000.902,50, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp49.636.336.434,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp36.743.335.531,50 atau -74,03%.

5.1.3.4. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Bila Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LO tahun 2020 yaitu Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp8.207.005.000,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp11.709.090.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp3.502.085.000,00 atau sebesar -29,91%.

5.1.4. Beban – LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2020 sebesar Rp171.372.392.542,90. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp191.466.954.180,46 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp20.094.561.637,56 atau -10,50%. Rincian Beban LO tahun 2020 komparasian dengan tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel 13. Beban LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	171.372.392.542,90	191.466.954.180,46	-10,50
Beban Operasi	171.372.392.542,90	191.466.954.180,46	-10,50
- Beban Pegawai	108.611.857.236,62	127.186.342.302,42	-14,60
- Beban Persediaan	4.265.868.460,06	4.487.885.166,86	-4,95
- Beban Jasa	27.837.667.353,33	24.447.180.833,67	13,87
- Beban Pemeliharaan	5.736.531.673,60	5.776.943.488,80	-0,70
- Beban Perjalanan Dinas	6.297.373.470,00	10.938.305.678,00	-42,43
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	135.536.826,67	6.469.088.994,33	-97,90
- Beban Penyisihan Piutang	18.487.557.522,62	12.161.207.716,38	52,02

5.1.4.1. Beban Operasi - LO

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 menanggung beban operasi sebesar Rp171.372.392.542,90. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp191.466.954.180,46 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp20.094.561.637,56 atau -10,50%. Rincian Beban Operasi tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2020 sebesar Rp108.611.857.236,62 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp127.186.342.302,42 maka terjadi penurunan sebesar Rp18.574.485.065,80 atau sebesar -14,60%.

5.1.4.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2020 sebesar Rp4.265.868.460,06 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp4.487.885.166,86 maka terjadi penurunan sebesar Rp222.016.706,80 atau sebesar -4,95%.

5.1.4.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila beban jasa tahun 2020 sebesar Rp27.837.667.353,33 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp24.447.180.833,67 maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.390.486.519,66 atau sebesar 13,87%.

5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Bila beban pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp5.736.531.673,60 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp5.776.943.488,80 maka terjadi penurunan sebesar Rp40.411.815,20 atau sebesar -0,70%.

5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau non pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya di luar wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2020 sebesar Rp6.297.373.470,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp10.938.305.678,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp4.640.932.208,00 atau sebesar -42,43%.

5.1.4.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban amortisasi (ATB) tahun 2020 sebesar Rp135.536.826,67 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp6.469.088.994,33 maka terjadi penurunan sebesar Rp6.333.552.167,66 atau sebesar -97,90%.

5.1.4.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat kemungkinan tidak dapat tertagihnya piutang. Bila beban penyisihan piutang tahun 2020 sebesar Rp18.487.557.522,62 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp12.161.207.716,38 maka terjadi kenaikan sebesar Rp6.326.349.806,24 atau sebesar 52,02%.

5.1.5. Aset

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp150.371.872.002,98 pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan aset tahun 2019 yaitu sebesar Rp256.387.836.400,65 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp106.015.964.397,67 atau -41,35%. Rincian pendapatan aset tahun 2020 beserta komparasian dengan tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel 14. Perbandingan Aset Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)x100
Aset	150.371.872.002,98	256.387.836.400,65	-6,50
Aset Lancar	-74.223.288.602,21	42.391.537.322,46	-52,57
- Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0
- Piutang Pajak	306.572.651.669,00	310.330.535.937,00	-0,05
- Piutang Retribusi	300.754.600,00	311.404.600,00	0
- Piutang Denda Pajak	(300.394.534,00)	0,00	100
- Piutang dari Pengembalian	0,00	2.940.135,00	-100
- Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	(369.476.340,00)	-100
- Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	(535.830.000,00)	0,00	100
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(288.074.851.577,00)	(269.587.294.054,38)	6,86
- Beban dibayar dimuka	48.125.000,00	126.058.333,33	-61,82
- Persediaan	1.251.389.248,79	1.205.165.839,85	3,83
Aset Non lancar	224.595.160.605,19	213.996.299.078,19	
- Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0
- Aset Tetap	210.755.465.841,53	199.975.319.955,36	
- Aset Lainnya	13.839.694.763,66	14.020.979.122,83	

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar –Rp74.223.288.602,21. Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun 2019 yaitu sebesar Rp42.391.537.322,46 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp116.614.825.924,67 atau -275,09%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan di bawah ini.

5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada akhir tahun 2020 tidak terdapat uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2019 yang lalu.

5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2020, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Nomor 936/6509/1996-IV/BPKAD tanggal 6 November 2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 Dan Awal Tahun Anggaran 2020 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, Bendahara Keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 27 Desember 2020. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Pengeluaran tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2019 yang lalu.

5.1.5.1.3. Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan tunggakan pungutan pajak yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang pajak Per 31 Desember 2020 sebesar Rp306.572.651.669,00 bila dibandingkan dengan piutang pajak tahun lalu yaitu sebesar Rp310.330.535.937,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp3.757.884.268,00 atau -1,21%. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Piutang PKB Umum

Saldo awal piutang PKB Umum di tahun 2020 Rp248.192.823.739,00 berkurang dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp6.809.049.039,00 sehingga angka piutang di saldo akhir tahun 2020 menjadi Rp241.383.774.700,00.

b. Piutang PKB Alber

Saldo awal piutang PKB Alber di tahun 2020 Rp31.181.521.771,00 berkurang dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp129.692.433,00. Namun di tahun 2020 ini ada penambahan angka piutang PKB Alber sebesar

Rp1.806.656.374,00 sehingga angka piutang di saldo akhir tahun 2020 menjadi Rp32.858.485.712,00.

c. Piutang BBNKB Alber

Saldo awal piutang BBNKB Alber di tahun 2020 Rp29.133.804.982,00 berkurang dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp1.756.140.868,00 serta adanya koreksi penetapan piutang BBNKB Alber pada UPTD Kutai Timur sehingga angka piutang di saldo akhir 2020 menjadi Rp25.095.406.759,00.

d. Piutang Pajak Air Permukaan

Saldo awal Piutang Air Permukaan di tahun 2020 Rp491.026.688,00 berkurang dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp266.176.261,00 dan penghapusan piutang pajak air permukaan yang kadaluwarsa masa pajak tahun 2012 sebesar Rp1.036.569,00. Namun di tahun 2020 ini ada penambahan angka piutang pajak air permukaan sebesar Rp381.329.014,00 sehingga angka piutang di saldo akhir 2020 menjadi Rp605.142.872,00.

e. Piutang PBBKB

Saldo awal PBBKB di tahun 2020 Rp334.114.614,00 berkurang dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp334.114.614,00. Namun di tahun 2020 ini ada penambahan angka piutang PBBKB sebesar Rp1.217.242.573,00 sehingga angka piutang di saldo akhir 2020 menjadi Rp1.217.242.573,00.

5.1.5.1.4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang retribusi merupakan tunggakan pungutan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang Retribusi di Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim per 31 Desember 2020 sebesar Rp300.754.600,00 bila dibandingkan dengan piutang retribusi tahun 2019 yaitu sebesar Rp311.404.600,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp10.650.000,00 atau -3,42%.

5.1.5.1.5. Piutang Denda Pajak

Piutang denda pajak dicatat sebesar rekapitulasi nilai denda atas keterlambatan pembayaran pajak setelah dikurangi dengan keringanan denda pajak dan penghapusan denda pajak. Nilai piutang denda pajak di Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim per 31 Desember 2020 sebesar -Rp300.394.534,00, bila dibandingkan dengan piutang denda pajak tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar 100%.

5.1.5.1.6. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya

Piutang lain-lain PAD yang sah lainnya diakui ketika adanya pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang memunculkan kewajiban dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. Nilai piutang lain-lain PAD yang sah lainnya di Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim per 31 Desember 2020 sebesar –Rp535.830.000,00, bila dibandingkan dengan piutang denda pajak tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar 100%.

5.1.5.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengalokasian cadangan yang dibentuk dari piutang pada tahun 2020 terdiri dari penyisihan piutang pajak daerah sebesar Rp288.074.851.578,00 bila dibandingkan dengan penyisihan piutang tak tertagih tahun lalu yaitu sebesar Rp269.587.294.054,38 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp18.487.557.523,62 atau 6,86%.

5.1.5.1.8. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.251.389.248,79 bila dibandingkan dengan persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp1.205.165.839,85 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp46.223.408,94 atau 3,84%.

5.1.5.1.9. Belanja Dibayar Dimuka

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membayar beberapa jasa atau fasilitas yang masa manfaatnya sampai dengan tahun 2020. Manfaat yang masih tersisa untuk tahun mendatang tersebut sebesar Rp27.500.000,00 bila dibandingkan dengan belanja dibayar dimuka tahun lalu yaitu sebesar Rp126.058.333,33 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp98.558.333,33 atau 78,19%. Hal ini dikarenakan penetapan perjanjian masa sewa untuk masing-masing tempat hanya berlaku untuk satu tahun.

Tabel 15. Belanja Dibayar Dimuka TA 2020

NO	SKPD/ UPTD	URAIAN	NO. & TGL SP2D	NOMOR, TANGGAL KONTRAK	BIAYA SEWA (Rp)	PERIODE		JUMLAH SISA BULAN SEWA	BEBAN SEWA DI TAHUN 2019 (Rp)	BEBAN SEWA DIBAYAR DI MUKA (Rp)
						JANGKA WAKTU (BULAN)	TANGGAL SEWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10=(6/7)*(7-9)$	$11=(6/7)\times 9$
1	UPTD PPRD Samarinda	Samsat Pembantu Sambutan	05775/LS/ UPTD- SMD/2020, 9/07/2020	027/003/ PENDA- 1/SMD/ 2020, 9/7/2019	22.000.000,00	12	9/7/2020 s/d 9/7/2021	6	11.000.000,00	11.000.000,00
2	UPTD PPRD Samarinda	Samsat Pembantu Sambutan	06064/LS/ UPTD- SMD/2020, 20/07/202 0	027/003.1/ PENDA- 1/SMD/ 2020, 9/7/2020	22.000.000,00	12	9/7/2020 s/d 9/7/2021	6	11.000.000,00	11.000.000,00
3	UPTD PPRD Balikpapan	Lahan Genset Samsat Kebun Sayur	11742/GU/U PTDBPP/20 20	085/GMS- SPSC/X/20 20, 9/9/2020	6.600.000,00	12	10/11/2020 s/d 9/11/2021	10	1.100.000,00	5.500.000,00
		Jumlah			50.600.000,00				23.100.000,00	27.500.000,00

5.1.5.2. Aset Non Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp224.595.160.605,19. Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun 2019 yaitu sebesar Rp213.996.299.078,19 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp10.598.861.527,00 atau 4,95%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset nonlancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp210.755.4465.841,53. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp199.975.319.955,36, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp10.780.145.886,17 atau 5,39%. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel 16. Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap 2019–2020

Uraian	2019	Bertambah	Berkurang	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6=(3/2)
ASET TETAP	199.975.319.955,36	10.780.145.886,17	0	210.755.465.841,53	5,39
Tanah	52.650.288.319,91	0	0	52.650.288.319,91	0
Peralatan dan Mesin	84.116.870.680,00	5.559.569.520,00	0	89.676.440.200,00	6,61
Gedung dan Bangunan	176.308.054.649,45	1.840.115.271,18	0	178.148.169.920,63	1,04
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.462.024.875,00	0	0	2.462.024.875,00	0
Aset Tetap Lainnya	284.427.328,00	0	0	284.427.328,00	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	540.941.400,00	3.380.461.094,99	0	3.921.402.494,99	624,92
Akumulasi Penyusutan	(116.387.287.297,00)	0	0	(116.387.287.297,00)	0

5.1.5.2.1.1. Tanah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tanah tahun 2020 sebesar Rp52.650.288.319,91 dibandingkan aset tanah tahun 2019 sebesar Rp52.650.288.319,91, tidak ada perubahan penambahan maupun pengurangan aset tanah.

5.1.5.2.1.2. Peralatan dan Mesin

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp89.676.440.200,00. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun 2019 yaitu sebesar Rp84.116.870.680,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp5.559.569.520,00 atau 6,61%.

5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp178.145.169.820,00. Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp176.308.054.649,45 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.837.115.170,55 atau 1,04%.

5.1.5.2.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.462.024.875,00, tidak ada penambahan maupun pengurangan aset dibandingkan dengan tahun lalu.

5.1.5.2.1.5. Aset Tetap Lainnya

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp284.427.328,00 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp284.427.328,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan aset dibandingkan dengan tahun lalu.

5.1.5.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2020 sebesar Rp3.921.402.494,99 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp540.941.400,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.380.461.094,99 atau 624,92%.

5.1.5.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomis aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar Rp122.028.428.544,00, bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp116.387.287.297,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp5.641.141.247,00 atau 4,85%.

5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp13.839.694.763,66. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun 2019 yaitu sebesar Rp14.020.979.122,83 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar

Rp181.284.359,17 atau 1,29%. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.2.1. Tagihan Jangka Panjang

Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahtanganan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui penjualan tunai atau dengan metode cicilan/angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara cicilan/angsuran lebih dari 12 bulan maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran yang dimasukkan dalam kelompok aset non lancar. Bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai Bagian Lancar TPA.

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp8.876.448.147,00. Bila dibandingkan dengan angka tahun lalu yaitu sebesar Rp9.153.115.679,50, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp276.667.532,50 atau -3,02%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya realisasi penerimaan pada penjualan aset berupa rumah jabatan/ rumah dinas.

5.1.5.2.2.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan software aplikasi untuk menunjang kegiatan. Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud sebesar Rp635.587.116,66. Bila dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud tahun lalu yaitu sebesar Rp540.203.943,33, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp95.383.173,33 atau 17,66%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penambahan aset tidak berwujud pada tahun 2020.

Tabel 17. Aset Tidak Berwujud dan Perhitungan Amortisasi Tahun 2020

No	URAIAN	TGL PEROLEHAN / PEMBELIAN	NILAI PEROLEHAN Rp.	AKUMULASI AMORTISASI s/d 2019	BEBAN AMORTISASI 1 JAN s/d 31 DES 2020	AKUMULASI AMORTISASI s/d 2020	NILAI ATB 31 DES 2020
			A	B	C	D = B + C	E = A - D
1.	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	31-Des-2011	145.500.000,00	145.500.000,00	-	145.500.000,00	-
2.	Pengadaan Software Sistem Antrian Samsat	20-Des-2011	20.625.000,00	20.625.000,00	-	20.625.000,00	-
3.	Software Aplikasi SP2D	31-Des-2012	29.800.000,00	29.800.000,00	-	29.800.000,00	-
4.	Aplikasi dan Sistem Komputerisasi Pendapatan Daerah (Aplikasi SPDP- Aplikasi Database/OS Software/Antivirus)	31-Des-2012	64.700.000,00	64.700.000,00	-	64.700.000,00	-
5.	Aplikasi Penyusunan Info Pajak Melalui SMS	24-Okt-2013	49.124.000,00	49.124.000,00	-	49.124.000,00	-
6.	Aplikasi Inventaris dan Controlling Barang	13-Nov-2013	67.975.000,00	67.975.000,00	-	67.975.000,00	-
7.	Website Dispenda Prov	2-Okt-2013	149.000.000,00	149.000.000,00	-	149.000.000,00	-
8.	Software Aplikasi SP2D (UPTD Penajam)	21-Mar-2014	24.200.000,00	24.200.000,00	-	24.200.000,00	-
9.	Sisfo Alat Berat dan Sisfo Tunggakan Pajak dan SKPD Jabatan	4-Agt-2014	240.000.000,00	240.000.000,00	-	240.000.000,00	-
10.	Software Aplikasi Antrian SQ.1.0 (UPTD Samarinda)	29-Sep-2014	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
11.	Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	4-Apr-2017	10.040.800,00	5.522.440,00	2.008.160,00	7.530.600,00	2.510.200,00
12.	Sistem Informasi Pendapatan	5-Mei-2017	24.640.000,00	13.141.333,33	4.928.000,00	18.069.333,33	6.570.666,67
13.	Upgrade Sistem Inventaris Barang	22-Agt-2017	44.440.000,00	21.479.333,33	8.888.000,00	30.367.333,33	14.072.666,67
14.	Aplikasi Pengembangan Basis IT	15-Mei-2018	119.350.000,00	39.783.333,33	23.870.000,00	63.653.333,33	55.696.666,67
15.	Aplikasi Perencanaan Penganggaran	3-Des-2018	46.145.000,00	9.998.083,33	9.229.000,00	19.227.083,33	26.917.916,67
16.	Pengembangan Aplikasi Kartu Kendali SPJ	28-Feb-2019	50.770.000,00	9.307.833,33	10.154.000,00	19.461.833,33	31.308.166,67
17.	Aplikasi Pengembangan Sistem Samsat Online	3-Sep-2019	75.895.000,00	5.059.666,67	15.179.000,00	20.238.666,67	55.656.333,33
18.	Aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis Web	3-Okt-2019	100.700.000,00	5.035.000,00	20.140.000,00	25.175.000,00	75.525.000,00
19.	Aplikasi Pembuatan Sistem Informasi Pemungutan Retribusi Daerah	21-Nov-2019	100.920.000,00	3.364.000,00	20.184.000,00	23.548.000,00	77.372.000,00
20.	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran	6-Des-2019	81.350.000,00	1.355.833,33	16.270.000,00	17.625.833,33	63.724.166,67
21.	Aplikasi Pelaporan WAPU PBBKB (APBD-P) dan Aplikasi SMS Broadcasting (APBD-P)	8-Des-2020	80.200.000,00	-	1.336.666,67	1.336.666,67	78.863.333,33
22.	Penambahan modul aplikasi terkait pembebasan Pajak Progressive II dan seterusnya (APBD P)	20-Nov-2020	50.280.000,00	-	1.676.000,00	1.676.000,00	48.604.000,00
23.	Penambahan modul aplikasi Samsat Online terkait Relaksasi PKB 10 s/d 30% (APBD P) Serta Penambahan modul aplikasi terkait Relaksasi BBNKB II 40% (APBD P)	8-Des-2020	100.440.000,00	-	1.674.000,00	1.674.000,00	98.766.000,00
JUMLAH			1.686.094.800,00	914.970.856,67	135.536.826,67	1.050.507.683,33	635.587.116,67

5.1.5.2.2.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini adalah Aset Rusak Berat. Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar Rp4.327.659.500,00. Bila dibandingkan dengan tahun lalu tidak terdapat perubahan pada nilai aset rusak berat.

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi per 31 Desember 2020 sebesar Rp195.092.280,01. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp176.475.725,68 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp18.616.554,33 atau 10,55%. Penjelasan atas kenaikan/penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.6.1. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya namun jasa atau barang belum diberikan ke masyarakat atau pihak lain. Pada akhir tahun 2020 terdapat Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp169.000.000,01. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu yaitu sebesar Rp57.583.333,68 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp111.416.666,33 atau 193,49%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah pendapatan diterima dimuka sesuai dengan perjanjian sewa dengan pihak kedua.

Tabel 18. Pendapatan Diterima Dimuka TA 2020

No	No. Perjanjian Sewa	Pihak Kedua	Lokasi	Luas M ²	Waktu Sewa (Bulan)	Terhitung	Berakhir	Nilai Sewa Rp	Sisa Waktu Sewa (Bln)	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	No.593/K.59/Penda-I/VII/2020 dan No. 1667/PKS/BPD-KCU/IX/2020	PT Bank Kaltimtara Kantor Cabang Utama Samarinda	Jl. Mayjen MT. Haryono Samarinda	4	36	1/7/2020	30/6/2023	45.000.000,00	30	37.500.000,00
2.	No.593.1/1100.1/Penda-1/VII/2020	PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Samarinda	Jl. Mayjen MT. Haryono Samarinda	6	36	6/7/2020	5/7/2023	45.000.000,00	30	37.500.000,00
3.	No.593.11/826/UPTD-PPRD/Penda-I/X/2020 dan No.1668/PKS/BPD-KCU/X/2020	PT Bank Kaltimtara Kantor Cabang Utama Samarinda	Jl. K.H. Wahid Hasyim Samarinda	4	36	1/10/2020	30/9/2023	45.000.000,00	33	41.250.000,00
4.	No.023/PRJ/BPD-BPP/XI/2020 dan No.593.1/611/Penda-I/XI/2020	PT Bank Kaltimtara Kantor Cabang Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 231 Balikpapan (Samsat Markoni)	7,5	12	1/12/2020	30/11/2021	38.000.000,00	11	34.833.333,33
5.	No.593.1/813.1/UPTD-BPP/IX/2019	PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Balikpapan	Jl. Mulawarman No. 1A Balikpapan (Samsat Batakan)	3,6	12	1/10/2020	30/9/2021	15.000.000,00	9	11.250.000,00
6.	No.032/0026/Penda-I/Tgr/I/2020 dan No.005/PRJ/BPD-TGR/I/2020	PT Bank Kaltimtara Kantor Cabang Tenggarong	Jl. Wolter Monginsidi KM 6 Tenggarong	10.35	12	2/2/2020	2/2/2021	15.000.000,00	1	1.250.000,00
7.	No. 4 Tahun 2019	PT Bank Kaltimtara Kantor Cabang Bontang	Jl. MH. Thamrin No.05 Bontang	2,64	12	14/6/2020	14/6/2021	10.000.000,00	5	4.166.666,67
8.	974/102/Penda-I/III/2018	PT Bank Kaltimtara Kantor Cabang Sendawar	Jl. Paulus Doy Lambeng, Kutai Barat	11	12	2/2/2020	2/2/2021	15.000.000,00	1	1.250.000,00
Jumlah								228.000.000,00		169.000.000,00

5.1.6.2. Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2020 terdapat Utang beban sebesar Rp27.926.350,00. Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp118.892.392,00. maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp90.966.042,00 atau -76,52%. Penurunan tersebut disebabkan oleh belanja yang menurun sejak Maret 2020 diakibatkan pandemi Covid 19.

Tabel 19. Rekapitulasi Utang Beban TA 2020

No.	Badan / UPTD	Beban Listrik Rp	Beban Air Rp	Beban Telepon Rp	Jumlah Utang Beban Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Bapenda Prov. Kaltim	-	2.476.218,00	3.012.000,00	5.488.218,00
2.	UPTD Samarinda	1.875.100,00	9.806.326,00	-	11.681.426,00
3.	UPTD Balikpapan	-	1.222.941,00	-	1.222.941,00
4.	UPTD Kutai Kartanegara	-	2.286.600,00	-	2.286.600,00
5.	UPTD Kutai Barat	-	-	-	-
6.	UPTD Kutai Timur	-	700.000,00	1.134.070,00	1.834.070,00
7.	UPTD Bontang	-	399.375,00	-	399.375,00
8.	UPTD Penajam Paser Utara	-	896.200,00	-	896.200,00
9.	UPTD Paser	-	1.172.020,00	-	1.172.020,00
10.	UPTD Berau	-	2.945.500,00	-	2.945.500,00
	Jumlah	1.875.100,00	21.905.180,00	4.146.070,00	27.926.350,00

5.1.7. Ekuitas

Kekayaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2020 sebesar Rp150.174.945.652,97. Nilai ini secara matematis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp256.211.360.674,97 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp106.036.415.022,00 atau -41,39%.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur beralamat di jalan Mayjend. MT. Haryono, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD PPRD tersebut beralamat sebagai berikut :

➤ UPTD PPRD Samarinda

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kota Samarinda beralamat di jalan KH. Wahid Hasyim, Samarinda.

➤ UPTD PPRD Kutai Kartanegara

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Kutai Kartanegara beralamat di jalan Wolter Monginsidi Km 6, Tenggarong, Kutai Kartanegara.

➤ UPTD PPRD Balikpapan

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kota Balikpapan beralamat di jalan Mulawarman, Batakan, Balikpapan.

➤ UPTD PPRD Bontang

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kota Bontang beralamat di jalan Mulawarman, Tanjung Limau, Bontang.

➤ UPTD PPRD Berau

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Berau beralamat di jalan DR. Murjani I No. 86, Tanjung Redeb, Berau.

➤ UPTD PPRD Kutai Timur

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Kutai Timur beralamat di jalan Bhayangkara, Sangatta, Kutai Timur.

➤ UPTD PPRD Penajam Paser Utara

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Penajam Paser Utara beralamat di jalan Propinsi Km 3, Penajam.

➤ UPTD PPRD Kutai Barat

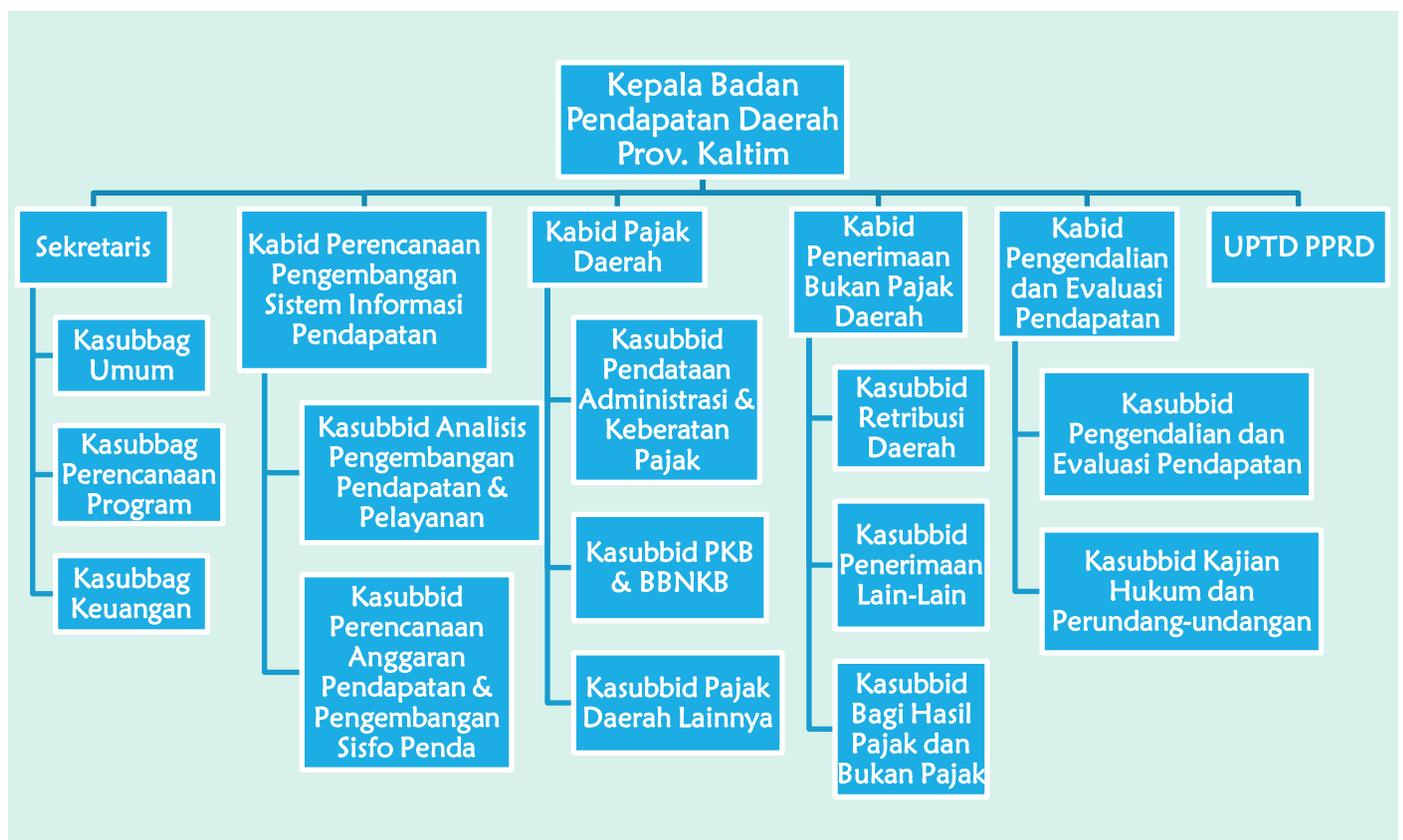
UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Kutai Barat beralamat di jalan Jenderal Sudirman No 1, Melak, Kutai Barat.

➤ UPTD PPRD Paser

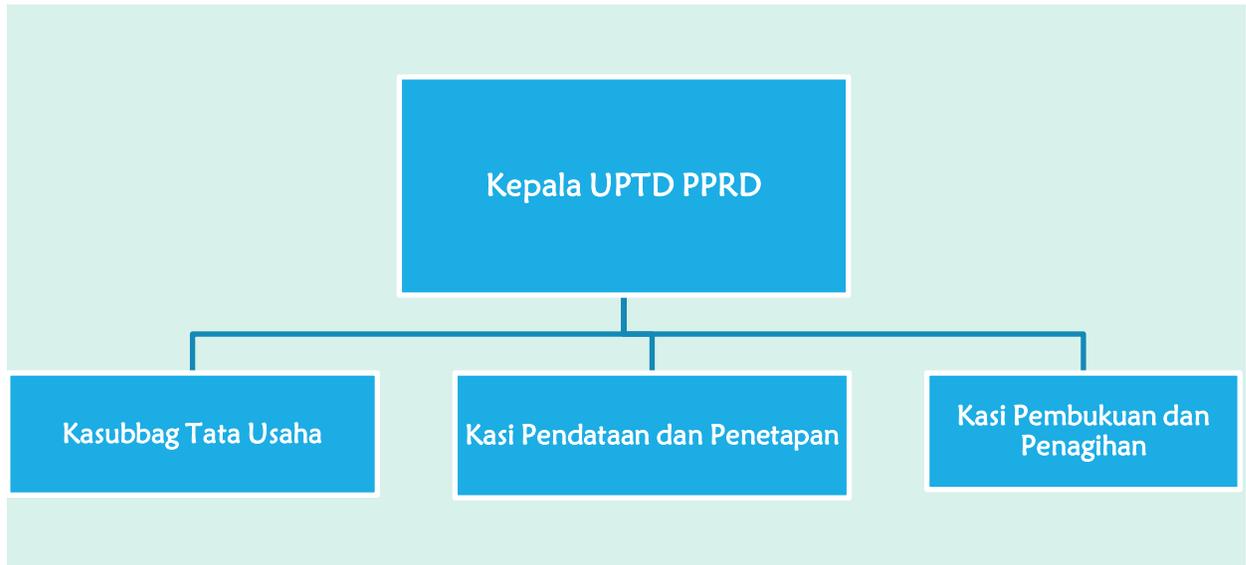
UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Paser beralamat di jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim



Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD PPRD Bapenda Prov. Kaltim



Masing – masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, bidang penerimaan bukan pajak daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan. Hal ini sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim dan UPTD PPRD dijabarkan sebagai berikut :

➤ Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, bidang penerimaan bukan pajak daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan.
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah.
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan pajak daerah.
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan.
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur

Tugas dan fungsi pokok yang menjadi tanggungjawab seluruh UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas yang diberikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah
- Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT).
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.
- Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam

menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusia adalah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan sumber daya manusia sebanyak 489 orang, terdiri dari PNS sebanyak 230 orang dan Non PNS sebanyak 259 orang, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 20. Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2020

Jabatan	Pendidikan								
	S-2	S-1	D-IV	D-III	D-II	D-I	SMA	SMP	SD
Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala UPTD PPRD	6	3	-	-	-	-	-	-	-
Kasi/Kasubbid	16	14	-	2	-	-	-	-	-
Staf PNS	7	56	-	9	1	-	76	6	10
Staf Non PNS	1	97	1	17	-	1	86	-	-
Jumlah	36	170	1	28	1	1	162	6	10

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

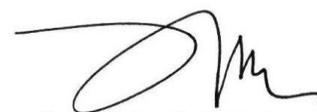
Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan danantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 4 Januari 2021

Kepala Badan,



DRA. HJ. ISMIATI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650914 199012 2 001